

## **REKALKULASI TRANSFORMASI KELOMPOK PENEKAN MENJADI PARTAI POLITIK: KAJIAN PADA HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

### *Abstract*

*The article to analyzes the opportunities Hizbut Tahrir Indonesia for transform of pressure group into a political party. This study stems from the analysis of a pressure group or organization that has been in Indonesia and ever tried to transform itself into a political party. This study took more cases in Pekanbaru. The results of the analysis of the strengths and opportunities describe Hizbut Tahrir Indonesia and predicting his desire to become a political party contestants elections in Indonesia in the future. The results of this study found a new theory about the transformation of a pressure group into a political party. Hizbut Tahrir Indonesia has conducted political movements from the beginning until now. Ideals end of Hizbut Tahrir Indonesia is to establish the Khilafah Islamiyah. In the concept of a single -party system, then the Khilafah Islamiyah may be referred to as having a single-party system in the party system of a country.*

*Keywords: opportunity, transform, pressure group, political party.*

**\* M. Zainuddin, Suryaningsih**

**\* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Abdurrah dan Dosen STISIP Imam Bonjol**

### **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Artikel ini mengkaji tentang peluang bertransformasi bagi kelompok penekan menjadi partai politik. Kajian ini bermula dari banyaknya kelompok penekan atau organisasi yang besar di Indonesia yang bertransformasi atau mencoba untuk bertransformasi menjadi partai politik. Sebut saja Nahdhatul Ulama yang pernah bergabung dengan Partai Masyumi. Namun, pada Mukhtamar NU ke-18 di Jakarta, Mei 1950, dikeluarkan rekomendasi NU keluar dari Masyumi dengan alasan akomodasi kader NU yang kurang dari Masyumi (Ridwan, 2008). Pada tahun 1952 NU resmi menjadi partai politik dan ikut pemilu pada tahun 1955 dan bisa mendapatkan kursi yang signifikan (Pamungkas, 2011). Akhirnya NU kembali menjadi organisasi biasa dan melepaskan diri dari kegiatan politik. Berbeda dengan SI dan NU, Muhammadiyah tidak bertransformasi menjadi satu partai politik, tetapi lebih kepada mengintegrasikan organisasinya dalam kegiatan partai politik (Partai Masyumi).

Nasional Demokrat yang pada awalnya adalah organisasi yang terdiri dari para tokoh bangsa baik di tingkat nasional maupun daerah, sekarang telah berubah menjadi partai politik bernama Partai Nasional Demokrat. Sejarah juga telah menyebutkan bahwa organisasi Sarikat Islam telah pernah bertransformasi menjadi partai politik. Sarekat Islam adalah organisasi yang berdiri tahun 1911 di Solo. Pada masa pimpinan HOS Tjokroaminoto, organisasi ini membentuk Partai Sarekat Islam (PSI). Pada tahun 1930-an PSI terbagi tiga: golongan berhaluan komunis merah sebagai embrio PKI, Partai Politik Islam Indonesia, dan golongan penyadar (Kasnawi dan Thaha, 2013). Transformasi tersebut terjadi karena keadaan yang menuntut mereka untuk ambil bagian dalam ranah politik negara.

Hizbut Tahrir Indonesia juga merupakan ormas yang besar di Indonesia. Fungsinya sama dengan fungsi Sarekat Islam, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah, yakni sebagai kelompok penekan dan kelompok cendikia. Usaha ormas

tersebut untuk mencapai tujuan gerakannya sering bersentuhan secara langsung dan tidak langsung dengan dunia partai politik. Partai politik dianggap cara paling instan untuk mencapai tujuan gerakan. Puncaknya adalah ketika kekuasaan dapat diraihinya.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah kelompok gerakan atau penekan yang berideologi Islam. Gerakannya berpijak di atas keharusan mengembalikan Khilafah Islamiyah (Anonim 2008). Tujuan HTI adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan menggunakan berbagai bentuk gerakan. Gerakan ini dapat pula disebut sebagai gerakan kelompok penekan yang akan memperjuangkan terlaksananya syariat Islam di Indonesia dan terbentuknya institusi Khilafah Islamiyah sebagai tujuan akhirnya.

Belajar dari pengalaman terdahulu, banyak ormas atau kelompok penekan yang berubah menjadi partai politik. Jadi, sebagai ormas atau kelompok penekan yang juga memiliki kader atau massa yang relatif banyak dan tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, maka sebenarnya dianggap layak HTI untuk bermetamorfosa menjadi partai politik. Hanya tinggal kemauan dari internal HTI itu sendiri untuk memposisikan diri menjadi bagian dari sistem pemilihan umum di Indonesia.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

### **a. Kajian Terdahulu**

Kajian tentang Hizbut Tahrir Indonesia telah banyak dilakukan oleh para Penulis terdahulu, diantaranya oleh Rathomy pada tahun 2007 di Yogyakarta. Rathomy mengkaji tentang demokrasi dan Hizbut Tahrir Indonesia, Tulisan ini hanya untuk mengungkapkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia memiliki konsep Khilafah Islamiyah yang menolak demokrasi.

Irwan Omar (2010) juga meneliti tentang kegagalan HTI sebagai gerakan *counter-hegemony*. Irwan mengungkapkan bahwa HTI sebagai suatu kelompok penekan mengalami

kegagalan dalam melakukan *counter-hegemony* terhadap umat Islam di Indonesia dari hegemony tradisional yang ada di Indonesia. Menurut Irwan, HTI hanya mampu melakukan *counter-hegemony* pada wilayah perkotaan yang mempunyai basis pelajar atau mahasiswa saja.

M. Zainuddin (2013) juga telah mengkaji bagaimana strategi Hizbut Tahrir Indonesia merubah pola kegiatan dakwah konvensional semata untuk menjadi gerakan sosial atau kelompok penekan. Kajian Zainuddin ini merekomendasikan untuk dilakukan Penulisan lebih lanjut tentang keinginan Hizbut Tahrir Indonesia untuk bertransformasi menjadi partai politik di Indonesia. Kajian pada artikel ini lebih tepat sebagai pelaksana dari rekomendasi tersebut, yakni lebih memfokuskan bahasannya pada transformasi kelompok penekan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjadi partai politik.

### **b. Perbedaan Partai Politik dengan Kelompok Penekan**

Sigit Pamungkas (2011) menjelaskan secara detail makna partai politik dan unsur-unsur yang menjadi ciri partai politik. Menurut beliau, partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Sehingga, dapat pula disebutkan ciri-cirinya yakni: Partai politik merupakan sebuah organisasi, merupakan instrument memperjuangkan nilai atau ideologi, berjuang melalui penguasaan struktur kekuasaan, dan ikut dalam proses pemilihan umum.

Kegiatan sebuah partai politik selalu bersentuhan dengan pengelolaan negara. Sebaliknya, kelompok penekan tidak secara langsung berhubungan dengan tugas tersebut. Walaupun demikian, terlepas dari perbedaan-perbedaan gradual tersebut, partai politik dan kelompok penekan memainkan peranan yang sangat esensial dalam menjamin kelangsungan suatu sistem politik (Amal, 2012).

Pamungkas (2011) menyebutkan bahwa partai politik yang hadir di luar parlemen secara tipikal menghadirkan perlawanan-perlawanan ideologis terhadap elit yang berkuasa. Kehadiran partai politik ekstra-parlemen ini dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok yang sebelumnya disingkirkan. Bahkan mereka berusaha untuk mentransformasikan sistem politik.

### **c. truktur Peluang Politik**

Rasionalisasi pandangan dalam gerakan atau kelompok penekan menuju partai politik dapat ditemukan dalam perspektif peluang politik. Pendekatan ini tidak hanya terfokus pada kondisi internal organisasi kelompok penekan saja, melainkan memberikan perhatian yang lebih sistematis pada lingkungan politik dan institusi tempat kelompok penekan tersebut beraktifitas. Hal inilah yang disebut oleh McAdam (1996) dan dikenal secara luas dengan konsep “struktur peluang politik” (*political opportunity structure*). Menurut Manalu (2009), fokus utama pendekatan struktur peluang politik ini adalah relasi yang terjadi di antara pelaku-pelaku yang ada di dalam institusi politik di satu pihak dan para pemrotés (*pressure group*) di pihak lain. Maju mundur dan keberhasilan kelompok penekan ditentukan oleh peluang dan hambatan di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas.

Teorisasi Eisinger yang mengadopsi pandangan Tocqueville mengatakan bahwa revolusi terjadi tidak ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan, tetapi aksi kolektif berupa revolusi muncul ketika sebuah sistem politik dan ekonomi yang tertutup mengalami keterbukaan (Situmorang 2007). Teorisasi ini mengemukakan pandangan bahwa kesempatan politik berbanding lurus dengan kondisi psikologis masyarakat sebagai akibat dari lemahnya pemerintahan.

Peter Eisinger (dikutip dari Meyer 2004) juga menyebutkan bahwa peluang politik terjadi apabila negara dengan tingkat keterbukaan yang luas bisa mengantisipasi kerusakan dengan

membuka berbagai bentuk partisipasi politik untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan, pada akhirnya muncullah kelompok penekan yang secara sistematis bergerak untuk memenuhi tuntutan bersama mereka yang penulis sebut sebagai penguasaan ranah kekuasaan melalui partai politik.

Tarrow (1998) menjabarkan mekanisme struktur kesempatan politik ini secara spesifik, diantaranya: Pertama, kelompok penekan muncul ketika akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan (sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Eisinger). Kedua, ketika keseimbangan politik sedang terpecah sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk. Ketiga, ketika para elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini digunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, ketika para pelaku perubahan digandeng oleh elit yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.

Struktur kesempatan politik selalu berhubungan dengan sumber daya eksternal. Sumber daya ini digunakan oleh para pelaku perubahan melalui terbukanya akses kepada kelembagaan politik dan perpecahan di tubuh para elit politik. Kriesi (dikutip dalam Tarrow 1998) menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal, dan strategi yang dipergunakan oleh para pelaku perubahan.

Secara sederhana, struktur kesempatan politik ini memandang bahwa lingkungan eksternal sangat berpengaruh terhadap gerakan kelompok penekan yang dilakukannya. Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, terbuka kesempatan atau peluang bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Semua komponen kelompok penekan menjadi leluasa untuk mengembangkan gerakannya.

## **3. METODE PENULISAN**

Penulisan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini akan mampu mengungkapkan rekalkulasi transformasi HTI

sebagai kelompok penekan menjadi partai politik. Hal ini disebabkan, *pertama*, Penulis kualitatif akan masuk ke obyek dan melakukan penjelajahan dengan pertanyaan besar sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas; *kedua*, Penulis dapat memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial dan politik sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang; dan *ketiga*, untuk memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi maka kepastian data akan lebih terjamin. Adapun jenis Penulisan ini adalah eksploratif, dimana Penulis akan mengeksplorasi internal HTI untuk dikonversikan dalam pemaknaan keinginan bertransformasi atau tidak.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Ekspansi Hizbut Tahrir ke Indonesia

Salah seorang Penulis gerakan Islam, R.H. Dekmejian menggunakan terma revivalisme Islam (*Islamic revivalism*) untuk menunjuk fenomena munculnya gerakan keagamaan Islam kontemporer di Timur Tengah (Rahmad, 2005). Konsep ini digunakan oleh Rahmad untuk menjelaskan genealogi dan transmisi revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia. Tulisan Rahmad tersebut menjelaskan banyak gerakan revivalis Islam yang di dalamnya juga termasuk Hizbut Tahrir, menjelaskan bagaimana ekspansi Hizbut Tahrir menjalar ke seluruh dunia hingga Indonesia.

Hizbut Tahrir merupakan sebuah kelompok gerakan yang berideologi Islam. Gerakannya berpijak di atas keharusan mengembalikan Khilafah Islamiyah dengan bertopang kepada ide sebagai sarana paling pokok dalam melakukan perubahan (Anonim, 2008). Gerakan ini telah mengeluarkan keputusan-keputusan dan pemikiran tentang politik yang kontroversial dan mengundang pro dan kontra dari ulama-ulama Islam di tengah pergulatan wacana penegakan demokrasi dan nasionalisme terutama di Indonesia.

Azyumardi Azra (2007) menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan antara Islam di Timur Tengah dengan Indonesia tidak hanya bersifat politis semata sebagaimana anggapan banyak kalangan akademisi. Hubungan keduanya juga menyangkut masalah keilmuan yang religius atau keagamaan. Transmisi tersebut, menurut Azra pada awalnya terjadi ketika banyak ulama Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan menetap dalam rentang waktu yang relatif lama di Haramain (Mekah dan Madinah). Para ulama tersebut belajar dengan ulama terkemuka di Haramain. Setelah selesai, mereka pulang ke Indonesia dan menjadi agensi atau transmitter dalam penyebaran ajaran Islam.

Pola transmisi gerakan dari Timur Tengah ke Indonesia juga melalui para alumni pendidikan Timur Tengah. Mereka mendalami pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah, kemudian membawanya ke Indonesia dan menyebarkannya di komunitas mereka dengan gerakan dakwah. Pola demikian (alumni Timur Tengah sebagai transmittor) menjadi pola utama transmisi gerakannya ke Indonesia. Sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah telah terjalin sejak abad ke 7 M (Rahmad, 2005). Hanya saja ide gerakan yang ditransmisikan bukan gerakan revivalisme Islam.

Ditemukan banyak versi yang menjelaskan dengan bentuk hasil dan argumentasi yang berbeda tentang waktu masuknya HT ke Indonesia. Rahmad (2005), Rathomy (2007), Triantini (2008), dan Kholil (2009) menjelaskan satu versi tentang proses dan waktu masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia yakni pada tahun 1982 hingga 1983. Versi Ahnaf (2004) menyebutkan bahwa ideologi Hizbut Tahrir telah hadir di Indonesia sejak an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. Pendapat Ahnaf ini tidak didukung oleh data yang kuat, apakah an-Nabhani pernah ke Indonesia? Siapa yang ditemui? dan apa agenda yang dilakukan oleh an-Nabhani ketika berada di Indonesia?

Bubalo dan Fealy (2005) menganggap bahwa gerakan revivalis Islam di Indonesia

merupakan satu kesatuan dengan yang ada di Timur Tengah. Proses masuknya bervariasi, ada yang ‘diantar’, ‘dijemput’ dan melalui ‘transfer’ ideologi. Dalam gerakan revivalisme ini termasuk di dalamnya Hizbut Tahrir.

Kehadiran HT di Indonesia dapat dikategorikan melalui perpaduan mekanisme ‘diantar’ dan ‘transfer’. Prosesnya dipelopori oleh beberapa orang warga negara Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan kelompok gerakan revivalisme Islam atau HT di Timur Tengah tepatnya di Yordania. Akibatnya, semua bentuk gerakan, simbol, doktrin dan metode gerakannya relatif sama.

Berdasarkan hasil penelitian Triantini (2008) dan Zulfadli (2010) yang dituangkan dalam masing-masing tesisnya dan tulisan Rahmad (2005) menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia bermula dari M. Mustofa dan Abdurrahman al-Baghdadi. Mustofa merupakan putra Abdullah bin Nuh, pengelola Pondok Pesantren al-Ghazali Bogor yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Tokoh HTI awal yang sangat berpengaruh di Pekanbaru adalah Muhammadun. Muhammadun merupakan aktivis gerakan Islam. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadun inilah terekrut banyak anggota HTI di Pekanbaru, salah satunya adalah Ardiansyah. Ketua HTI Riau yang pertama adalah Muhammadun dan kemudian dilanjutkan oleh Ardiansyah.

Seperti hal kota besar lainnya, HTI masuk di Pekanbaru juga melalui kampus-kampus besar di Pekanbaru. Melalui tangan Muhammadun, HTI mulai masuk ke kampus UIN Sultan Syarif Kasim. Secara perlahan, HTI menguasai organisasi intra kampus UIN, yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Karamah. Pada awal berdirinya pada tanggal 12 Maret 1989, LDK Al-Karamah merupakan organisasi intra kampus UIN Suska Riau yang dikelola oleh aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) Riau. PII Riau sebagai organisasi ekstra kampus bergerak secara formal di kampus

UIN Suska Riau melalui LDK Al-Karamah tersebut. Tetapi, sejalan dengan perkembangan waktu, aktivis HTI mulai banyak dan menguasai pimpinan LDK Al-Karamah tersebut.

Secara ekstra kampus tetapi masih bergerak untuk mahasiswa, HTI juga membentuk Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan). Gema Pembebasan ini dibentuk di seluruh kampus besar di Pekanbaru. walaupun secara structural tidak ada keterkaitan antara HTI dengan Gema Pembebasan, tetapi secara ideologi Gema Pembebasan merupakan sayap pergerakan HTI di tataran kampus.

## **b. Peluang Politik Transformasi Hizbut Tahrir Indonesia**

Transformasi kelompok penekan menjadi partai politik merupakan pekerjaan yang sulit. Proses transformasi tersebut juga memperhatikan kesempatan yang diberikan oleh sistem politik suatu negara. Kesempatan tersebut juga berlaku sama bagi kelompok lainnya. Kesempatan tersebut bisa juga menjadi *boomerang* bagi kelompok penekan, karena kebebasan itu memiliki batas dan pemerintah juga punya peran ganda: melayani dan memaksa kehendaknya.

Manalu (2009) menyebutkan bahwa peluang-peluang politik tidak hanya menguntungkan kelompok penekan itu sendiri, namun juga bisa dipergunakan para lawan untuk melemahkan gerakan. Dengan kata lain, lanjut Manalu peluang tersebut bukanlah monopoli gerakan, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang kontra terhadap gerakan, dimana kepentingan juga berbeda dengan gerakan tersebut. Bisa jadi, dengan terbukanya peluang politik, suatu gerakan akan tergoda untuk masuk ke dalam wilayah politik formal, sehingga ideologi gerakan akan tercemar dan luntur.

Konsep struktur peluang politik telah menyebutkan beberapa strategi untuk menggunakannya, diantaranya memobilisasi sumber daya dan *framing*. HTI telah menggunakan kedua strategi tersebut untuk menancapkan

ideologinya dalam sendi kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kedua strategi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan oleh HTI pada saat sistem politik bangsa Indonesia mengalami keterbukaan, dari rezim otoriter kepada demokratis.

Tarrow (1998) mengatakan bahwa kelompok penekan akan dapat melakukan kegiatan dengan luasa apabila kesempatan politik suatu negara mengalami keterbukaan. Pendapat Tarrow tersebut tepat untuk menjelaskan eksistensi HTI pasca turunnya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan yang otoriter di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa rezim otoriter Soeharto, HTI tidak bisa eksis dan tidak mampu melakukan gerakan dengan luasa (mobilisasi sumber daya dan pembingkai) dalam bentuk formalisasi ideology islam. Hal ini disebabkan oleh terkekang dan terbatasnya gerakan HTI sebagai organisasi yang berbasis agama Islam fundamentalis dan bersifat subversif.

Jadi, struktur peluang politik disini hanya menjelaskan sebagai konteks atau masa yang tepat untuk melakukan strategi membangun kekuatan dalam mencapai cita-cita HTI. Dalam kesempatan politik yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dalam dua bentuk, yakni: memanfaatkan reformasi serta sistem demokrasi antara peluang dan tantangan.

### *1. Reformasi: Ruang Peluang*

Reformasi muncul setelah Soeharto mundur dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Ini menandakan bahwa kran kebebasan dari segala hal dibuka kembali setelah lama diredam oleh Orde Baru. Banyak organisasi gerakan yang muncul, baik yang sudah ada dan selama ini bergerak di bawah tanah maupun yang hadir dengan wajah baru yang berupaya andil untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Organisasi yang dimaksud adalah semua organisasi gerakan yang tidak berlandaskan Pancasila sebagaimana yang dikehendaki Presiden Soeharto melalui undang-undang tentang keormasan.

Secara umum, ada dua hal yang menyebabkan kebangkitan dan penyebaran gerakan HTI sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto, yakni: krisis struktural dan krisis kultural. Krisis struktural terdiri dari kondisi sosial dan politik yang tidak pasti, pemerintahan yang lemah, tidak berfungsinya hukum, dan kekacauan ekonomi. Sementara itu, krisis kultural mencakup peradaban Islam tekstual, keyakinan yang kuat terhadap teori konspirasi, kesalahan dalam memahami globalisasi, dan krisis identitas (Anwar 2009).

Bebasnya HTI berekspresi untuk membangun kelompok penekan tidak terlepas dari jatuhnya Soeharto yang diikuti oleh euforia demokrasi. Dalam kondisi seperti inilah masyarakat sangat bersemangat merayakan kebebasannya dengan salah satu caranya adalah membentuk organisasi yang membawa umat Islam kembali kepada sistem hukum Islam. Pada masa pemerintahan Habibie, kebebasan pers tidak terkendali, sehingga proses pembingkai oleh HTI untuk memperkuat basis gerakannya menjadi makin terbuka. Demikian juga halnya pada Gus Dur yang tidak mampu mengendalikan ketidakstabilan politik bangsa, dan menyebabkan makin menguatnya kelompok militan untuk menggantikan rezim yang lahir dari demokrasi menjadi sistem Khilafah Islamiyah. Terlebih lagi pada masa Megawati. Presiden wanita ini dianggap sangat lemah terhadap Barat dan Amerika Serikat dalam hal isu terorisme. HTI yang anti Barat semakin bersemangat mengisukan kejelekan Mega dan harus diganti (Anwar 2009).

Dari kondisi tersebut, jelas HTI memanfaatkannya sebagai momen untuk mengkampanyekan ideologi kembali kepada identitas Islam. HTI mempromosikan apa yang mereka anggap sebagai ajaran Islam yang benar dan murni berdasarkan tafsiran subjektifnya. Menurut penulis, agenda ini sebenarnya adalah bentuk krisis identitas umat Islam akibat ketidakmampuan umat Islam dalam merespon proses globalisasi. Ketidakmampuan ini mengakibatkan tumbuhnya semangat dan percaya diri yang tinggi untuk menolak globalisasi tersebut.

Menurut penulis, kejadian seperti ini persis dengan kondisi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika membawa ajaran Islam pertama kali di Mekkah. Ketika itu, beliau melakukan gerakan penyebaran ajaran Islam secara tersembunyi. Setelah kondisi yang memungkinkan, baru kemudian Nabi bersama para sahabatnya melakukan gerakan (dakwah) secara terang-terangan untuk mensosialisasikan Islam hingga sampai ke Indonesia seperti yang dirasakan saat ini.

Perbedaan dari kedua kondisi tersebut adalah ketika HTI melakukan gerakan *under ground* disebabkan oleh faktor keotoriteran penguasa atau karena takutnya penguasa dengan ideologi yang lain selain Pancasila, apalagi yang sifatnya ekstrim atau fundamentalis. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, hanyalah karena kekhawatiran dengan keselamatan Nabi dan keluarga serta penolakan yang frontal dari pembesar-pembesar suku Quraisy waktu itu. Saat itu, Islam merupakan produk baru. Berbeda dengan yang dibawa HTI, sistem Khilafah merupakan produk lama atau reinkarnasi dari masa lalu (mulai masa Nabi Muhammad hingga jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani).

Dalam pandangan Samuel P. Huntington (dikutip dari Zulfadli, 2010), adanya kesempatan politik selalu diawali dengan tiga hal, yakni: Pertama, legitimasi terhadap negara yang berkurang, sehingga rakyat mampu menyusun gerakan secara mandiri. Kedua, terdapat erosi dalam tubuh kekuasaan negara, sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya yang kemudian menggerakkan kelompok penekan yang menentang kekuasaan lewat aksi protes dan demonstrasi. Ketiga, dari kedua kondisi tersebut maka akan muncul berbagai bentuk mobilisasi kelompok penekan yang ikut mendorong dan memperkuat proses ke arah transisi atau perubahan yang diinginkan.

## 2. Demokrasi: Tantangan dan Peluang

Demokrasi memang menjadi suatu terma dan sistem yang ditantang oleh HTI dan harus diganti dengan sistem Khilafah Islamiyah. Tetapi,

tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya demokrasi ini HTI justru lebih bisa secara leluasa menggunakan strategi gerakannya untuk membangun kelompok penekan dan jika HTI mau maka akan berpeluang menjadi partai politik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari konsep demokrasi yang menginginkan adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. Dibandingkan dengan di negara lain yang tidak menganut demokrasi, HTI tidak dapat berkembang dengan baik. Berbeda halnya dengan HTI yang ada di negara yang demokratis seperti Australia, Indonesia dan lain-lain. Organisasi Islam fundamentalis bebas bergerak di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto yang otoriter.

Robert A. Dahl (2001) dalam buku utamanya mengenai demokrasi, menjelaskan bahwa asosiasi atau organisasi yang bebas merupakan sebuah sumber pencerahan dan pendidikan bagi masyarakat. Organisasi yang bebas tidak saja memberikan berbagai informasi kepada warganya, tetapi juga kesempatan untuk melakukan diskusi, pertimbangan dan penguasaan kemampuan politik. Karena menurut Dahl, demokrasi memerlukan organisasi yang besar untuk bisa mengontrol berjalannya negara. Dengan suasana yang demokratis ini, HTI bebas dan eksis menjalankan strategi gerakannya untuk membangun kelompok penekan yang revolusioner.

Menurut pengamatan Penulis, HTI hanya bisa muncul di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang sangat kuat. Namun, HTI tetap saja menentang demokrasi sebagai suatu sistem dengan melupakan hanya dengan berkah demokrasilah HTI bisa eksis. HTI memang anti terhadap demokrasi dan menjadi agenda utamanya untuk menggantikan sistem tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa HTI hanya bisa subur pada negara yang demokratis.

Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang 'diharamkan' oleh HTI. Makanya, ketika HTI menganggap demokrasi sebagai suatu peluang dalam berstrategi, HTI tidak mencelupkan dirinya untuk bergumul dengan sistem demokrasi tersebut. Dalam hal ini, Sigit Pamungkas dalam kata

pengantarnya sebagai editor buku karya Rathomy (2007) menyebutkan HTI bukan partai politik, tetapi hanya sebagai kelompok kepentingan. HTI hanya sebatas menggunakan demokrasi sebagai waktu dalam kesempatan.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin yang direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia (Rathomy, 2007), Ikhwanul Muslimin menceburkan dirinya dalam sistem demokrasi dan juga menganggapnya sebagai suatu kesempatan. PKS lebih bersifat oportunistik. Sedangkan HTI tidak masuk dalam parlemen dan kelihatan lebih idealis karena HTI memiliki argumentasi pada tataran ontologi dan epistemologi dengan klaimnya bahwa kedaulatan di tangan Tuhan, bukan pada manusia (Rathomy, 2007).

Hasan Ko Nakata (dikutip dari Triantini, 2008) sebagai salah seorang pembicara pada Konferensi Khilafah yang diselenggarakan oleh HTI pada tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta. Nakata merupakan pembicara dari perwakilan HT Jepang, ia menyebutkan bahwa Indonesia memenuhi persyaratan sebagai negara yang akan dijadikan pusat kembalinya khilafah karena beberapa hal: Pertama, dari segi populasi, Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam dan penduduk Islam yang terbesar di dunia. Kedua, sistem demokrasi yang ada membuat kebebasan berpendapat sangat luas di Indonesia, sehingga membuat HTI memiliki ruang yang sangat luas untuk berekspresi dan mensosialisasikan agenda perjuangan khilafah.

Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Tocqueville seperti yang dikutip oleh Situmorang (2007) yang mengatakan bahwa revolusi atau perubahan sosial yang dilakukan oleh kelompok penekan seperti HTI tidak hanya terjadi ketika kelompok masyarakat tertentu mengalami tekanan, tetapi juga karena adanya kelompok penekan yang muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik suatu negara mengalami keterbukaan.

Dalam konsep analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) yang

diperkenalkan oleh Wehrich (dikutip dari Muhammad, 2008) sebagai komponen penentu keberhasilan pencapaian Khilafah Islamiyah, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang berasal dari lingkungan eksternal, yakni tantangan (*threats*) dan peluang (*opportunities*). Adanya demokrasi sebagai peluang -peluang politik bagi HTI sebenarnya tidak hanya menguntungkan HTI semata sebagai kelompok penekan. Namun, bisa juga digunakan oleh para lawannya untuk melemahkan gerakan (Manalu, 2009).

Salah satu indikator keberhasilan gerakan HTI adalah diterimanya ide formalisasi ideologi Islam dalam kehidupan bernegara. Perda syariat akan menjadi indikator bahwa ide HTI diterima oleh banyak kalangan. sudah adanya perda syariat merupakan adanya proses pelegalformalan Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dari *grassroot* (Jurdi, 2008).

## 5. KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan kelompok penekan yang sudah memiliki basis massa yang relatif banyak dan ada di seluruh Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, HTI dibubarkan oleh pemerintah. Ada dua dimensi yang berbeda: pertama, jumlah massa yang semakin banyak. Kedua, organisasinya dibubarkan oleh pemerintah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, sebaiknya HTI mengambil kesempatan peluang politik yang ada di Indonesia untuk mentransformasikan dirinya menjadi partai politik. Tindakan tersebut memang berlawanan dengan ideologi kelompok, tetapi merupakan tindakan “mengalah selangkah untuk maju beberapa langkah.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, MI. 2004. ‘MMI dan HTI; The Image of the Others’ dalam *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: AM Abigebril et.al., SR-Ins Publishing.
- Amal, TA & Panggabean, SR. 2004. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.



---

## Hasil Penelitian

---

- Anonim. 2008. *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Anwar, MS. 2009. 'Kebangkitan dan Perkembangan Gerakan Salafiah Radikal di Indonesia Pasca Soeharto' dalam *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama: Peluang Ataukah Ancaman untuk Perdamaian, Keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa?*. Khudori ed. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Azra, A. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. cetk. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bubalo, A & Fealy, G. 2005. *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism, and Indonesia*. The Lowy Institute for International Policy.
- Dahl, RA. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. trans. AR Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jurdi, S. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasnawi, MT. & Thaha, R. 2013. *Kekuatan Sosial Politik Indonesia*. Banten: Universitas Terbuka.
- Kholil, M. 2009. *Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*. Jakarta: Media Pratama.
- Manalu, D. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik; Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McAdam, D. 1996. 'Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions', in *Comparative Perspective on Social Movements Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*. eds. DM Adam, JDM Carthy, & MN Zald. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meyer, DS. 2004. *Protest and Political Opportunities*. Annual Review of Sociology.
- Muhammad, S. 2008. *Matriks dan Skenario dalam Strategi*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Omar, I. 2010. 'Kegagalan HTI dan PKS sebagai gerakan counter-hegemony'. non-publikasi.
- Pamungkas, S. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Wilfarism.
- Rahmat, MI. 2005. *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, NK. 2008. *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*. ed. A Ta'yuddin & S Mahdi. Jakarta: Erlangga.
- Rathomy, AI. 2007. *PKS & HTI: Genealogi dan Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Situmorang, AW. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Pelawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarrow, S. 1998. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Triantini, ZE. 2008. 'Peran politik perempuan Hizbut Tahrir Indonesia'. non-publikasi.
- Zainuddin, M. 2013. *Inisiasi Gerakan Sosial (Upaya Hizbut Tahrir Indonesia Membangun Gerakan Sosial pada Orde Reformasi di Yogyakarta)*. Jurnal Alboacen Vol. 1 Nomor 1.
- Zulfadli. 2010. 'Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta'. non-publikasi.

